



Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program*

Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Many countries in the world run Citizenship by Investment Programs (CIP) including European Union member countries, namely Bulgaria, Cyprus and Malta. CIP can open opportunities for financial crimes such as money laundering, corruption and tax fraud. In the European Union itself this raises more problems when the rules relating to granting citizenship in the European Union stating that every citizen of an EU member state is an EU citizen. Therefore, the European Union carries out a securitization policy towards CIP. This study aims to explain the securitization process that has been carried out through the concept of securitization from Copenhagen School and Amitav Acharya's modified model framework which consists of six elements namely issue area, securitizing actors, security concept, process, outcome and conditions affecting securitization. The result showed that the European Union's securitization process on the issue of Citizenship by Investment Program had run quite well but there were obstacles. These obstacles are the prerogative of the state in granting and losing citizenship also the existence of desecuritization actors.

Keywords: *Citizenship by Investment Program, European Union, Securitization, Copenhagen School*

PENDAHULUAN

Dalam situs webnya, OCCRP mengatakan “*for refugees and poor migrants, travel can be terrifying, with no guarantee of a welcome at the end. For the one percent, it's a different story*” (OCCRP, n.d). Kalimat ini ada benarnya mengingat kenyataan yang saat ini terjadi di luar sana. Ketika seseorang ingin berpindah (migrasi) dari satu negara ke negara lain seringkali banyak prosedur yang harus dijalani. Proses migrasi tersebut juga tidaklah mudah. Negara seringkali memberlakukan kebijakan yang ketat untuk mencegah masuknya para migran ini terutama mereka yang berstatus pengungsi. Akan tetapi, *Citizenship by Investment Program* (CIP) hadir dan justru dengan sengaja menawarkan fasilitas bagi seseorang untuk pindah dari satu negara ke negara lain. *Citizenship by Investment Program* sendiri adalah sebuah skema yang memberikan status kependudukan dan kewarganegaraan kepada orang asing sebagai imbalan atas kontribusi ekonomi kepada negara tersebut (Nahar & Rahman, 2017, p. 59).

Banyak negara di dunia menjalankan skema pemberian kewarganegaraan seperti ini dan beberapa di antaranya merupakan negara anggota Uni Eropa yaitu Bulgaria, Cyprus dan Malta (Transparency International, 2018). CIP dapat

membuka peluang bagi masuknya uang-uang hasil kejahatan pencucian uang serta memungkinkan terjadinya korupsi di institusi negara dengan masuknya uang dalam jumlah yang besar. Di Uni Eropa sendiri hal ini semakin menimbulkan permasalahan ketika aturan terkait pemberian kewarganegaraan di Uni Eropa menegaskan bahwa setiap warga negara dari negara anggota Uni Eropa merupakan warga negara Uni Eropa. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan setiap negara anggota dengan pertimbangan ketika seorang penjahat berpotensi menjadi warga negara di salah satu negara yang menjalankan CIP yaitu Bulgaria, Cyprus dan Malta, maka dampak yang akan diterima tidak terbatas pada ketiga negara itu tetapi juga negara anggota lain maupun Uni Eropa secara keseluruhan. Hal ini disebabkan hak-hak sebagai warga negara Uni Eropa dapat diaktualisasikan di seluruh negara anggota Uni Eropa termasuk di dalamnya hak untuk bertempat tinggal, berpindah dan mendapat perlindungan diplomatik.

Secara alamiah, industri ini memang berisiko tinggi. Para penjahat dan koruptor cenderung mencari destinasi menarik yang menawarkan kemewahan sekaligus menyediakan *safe haven* bagi mereka. Dalam kasus ini, melalui kepemilikan paspor Uni Eropa memudahkan para pelaku pencucian uang untuk ‘mencuci’ uangnya di bank-bank dikarenakan bank mungkin saja tidak melakukan *screening* yang lebih ketat terhadap pemilik paspor Uni Eropa dibandingkan bila mereka memiliki paspor negara lain yang berada di dalam daftar risiko tinggi terhadap pencucian uang (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 18). Pada akhirnya hal ini menjadikan negara-negara yang menjalankan CIP serupa *safe haven* karena memberikan para penjahat ini kesempatan untuk menghindari hukuman, merasakan kebebasan dan mendapat perlindungan melalui kewarganegaraan yang mereka miliki dari CIP.

Oleh karena itu, Uni Eropa melakukan kebijakan sekuritisasi terhadap CIP. CIP masuk dalam perdebatan Parlemen Uni Eropa pada Januari 2014 (Džankić, 2015, p. 1). Debat yang diberi judul ‘*Citizenship for sale*’ tersebut dilatarbelakangi oleh keputusan Pemerintah Malta pada Oktober 2013 memberi izin pada individu yang telah menginvestasikan sebesar 650.000 euro untuk menjadi warga negara Malta dan secara tidak langsung menjadi warga Uni Eropa (Džankić, 2015, p. 1). Semenjak itu, Uni Eropa melalui parlemen terus menggiatkan upaya sekuritisasi dan mendesak Komisi Uni Eropa sebagai badan eksekutif untuk segera memberi tanggapan terkait masalah CIP.

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran mengenai CIP di Uni Eropa sekaligus menjelaskan bagaimana sekuritisasi Uni Eropa terhadap CIP di Bulgaria, Cyprus dan Malta. Penelitian ini akan menggunakan konsep sekuritisasi dari *Copenhagen School* dan kerangka kerja model modifikasi Amitav Acharya yang disiapkan dalam IDSS *Ford Project on Non-Traditional Security in Asia* di mana terdapat enam unsur yaitu *issue area*, *securitizing actor*, *security concept*, *process*, *outcome* dan *conditions affecting securitization* (Callabero-Anthony & Emmers, 2016, p. 6-8).

PEMBAHASAN

CIP pertama kali muncul sekitar tahun 1980 dan 1990, ketika St. Kitts & Nevis meluncurkan program CIP mereka pada 1984, satu tahun setelah negara tersebut merdeka dari Inggris (BBC, 2017). Walaupun sempat tidak begitu diminati, pada 2009 pendaftar CIP melonjak dikarenakan strategi pemasaran yaitu

pemilik paspor St. Kitts & Nevis mendapat visa bebas akses ke dua puluh enam negara yang termasuk di dalam *Schengen Area* (BBC, 2017). Selain St. Kitts & Nevis, Dominica juga meluncurkan CIP tahun 1993 (Nomad Capitalist, 2018), dan sejak saat itu, bisnis ini mengalami perkembangan pesat. Banyak negara di dunia kemudian mengikuti jejak St. Kitts & Nevis. Di Benua Eropa sendiri, Inggris menjadi pelopor bisnis semacam ini pada tahun 1990an (BBC, 2017).

Perkembangan CIP menjadikan kewarganegaraan sebagai komoditas hangat yang diperjualbelikan. Negara berbondong-bondong menawarkan potensi terbaik mereka mulai dari pemandangan alam yang menakjubkan hingga iklim bisnis yang menguntungkan. Negara-negara di Kepulauan Karibia menjadi salah satu destinasi paling terkenal bagi para peminat CIP dengan keadaan alam yang menakjubkan, pasir putih membentang, jumlah investasi rendah, persyaratan kependudukan tidak rumit serta proses yang terhitung cepat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Tidak hanya bagi investor, program ini juga menguntungkan bagi negara-negara di Kepulauan Karibia sebagai sokongan ekonomi yang penting. Bahkan, di St. Kitts & Nevis, paspor adalah komoditas ekspor terbesar mereka dan menurut IMF, CIP menyumbang 14% PDB St. Kitts & Nevis tahun 2014 (BBC, 2017).

Salah satu alasan ketertarikan investor pada CIP adalah mobilitas. Melalui CIP, seseorang bisa tinggal, bekerja dan memperoleh akun bank secara sah. Bahkan, yang paling penting, seseorang dapat memperoleh akses bebas visa ke berbagai negara di dunia. Alasan lainnya adalah CIP dapat digunakan sebagai asuransi. Selain itu, faktor manajemen pajak, keluarga dan pendidikan juga turut melatarbelakangi keputusan untuk mendaftar CIP (Arton Capital, n.d). Kebanyakan dari CIP yang ditawarkan juga tersedia bagi pendaftar yang memiliki keluarga sehingga pasangan dan anak-anak dari pendaftar CIP juga ikut memperoleh kewarganegaraan (Arton Capital, n.d). Hal ini menunjukkan adanya kesempatan untuk menikmati masa depan yang lebih baik melalui sistem pendidikan dan gaya hidup di negara-negara yang menjalankan CIP.

Seringkali banyak program atau skema untuk memperoleh status kependudukan dikategorikan sebagai CIP, padahal program itu belum tentu CIP. Program ini dikenal sebagai *residence by investment* (RBI). Satu hal mendasar yang perlu dipahami dari perbedaan kedua hal ini adalah apa yang akan didapatkan investor. RBI merupakan sebuah program yang memperbolehkan seseorang untuk dapat tinggal, bekerja, melanjutkan studi dan menetap di suatu negara dalam periode waktu tertentu (2ndPassport, n.d). Perbedaan RBI dengan CIP adalah proses perolehan kewarganegaraan di mana CIP lebih cepat. Selain itu, RBI mengharuskan seseorang untuk menetap terlebih dahulu di suatu negara dalam kurun waktu tertentu untuk dapat memperoleh kewarganegaraan di kemudian hari (Džankić, 2015, p. 14). Dengan kata lain, RBI tidak menawarkan kewarganegaraan secara langsung seperti apa yang ditawarkan CIP.

Ada tiga negara Uni Eropa yang menjalankan CIP yaitu Bulgaria, Cyprus dan Malta. Bulgaria bergabung dengan Uni Eropa sejak 1 Januari 2007 (European Union, n.d). Bulgaria sendiri merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang menjalankan baik CIP maupun RBI. CIP di Bulgaria dikenal dengan nama *Fast Track to Citizenship Program*. Program ini disebut '*fast track*' karena pada dasarnya program ini memerlukan persyaratan *residency* di mana dalam jangka waktu satu tahun telah bertempat tinggal secara permanen di Bulgaria maka

seseorang dapat memiliki kewarganegaraan (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 54). CIP di Bulgaria telah dijalankan semenjak tahun 2013 dan hingga tahun 2017 telah menerima 16 pendaftar yang berasal dari Rusia sebanyak lima orang, Lebanon dan India sebanyak dua orang serta Mesir, Ethiopia, China, Ukraina, Vietnam, Pakistan dan Amerika Serikat masing-masing satu orang (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 62-63).

Cyprus bergabung dengan Uni Eropa sejak 1 Mei 2004 (European Union, n.d). Cyprus mulai menjalankan CIP di negaranya sejak 24 Mei 2013, dua bulan setelah pengumuman *bailout* secara internasional sebesar 10 miliar euro oleh *Eurogroup, European Commission, European Central Bank* dan *International Monetary Fund* (Džankić, 2015, p. 8). Terhitung dari 2013 hingga Maret 2018 sebanyak 1.685 orang telah lolos pendaftaran CIP di Cyprus (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 62-63). Total investasi yang masuk melalui CIP berjumlah 4,8 milyar euro (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 66). Tidak ada persyaratan terkait waktu tinggal. Nama-nama pendaftar akan dipublikasi di surat kabar nasional selama dua hari berturut-turut dan proses *review* akan memerlukan waktu enam bulan serta investasi dapat dipulihkan setelah tiga tahun lamanya (Transparency International & Global Witness, 2018, p. 72).

Malta bergabung dengan Uni Eropa semenjak 1 Mei 2004 dan pada 2007 telah menjadi anggota *Schengen Area* (European Union, n.d). Malta mengadopsi Undang-Undang XV pada Oktober 2013 untuk mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan Malta Bab 188 sekaligus memperkenalkan *Individual Investor Programme* (IIP) (Džankić, 2015, p. 10). Program ini menawarkan kewarganegaraan Malta secara langsung melalui investasi sebesar 650.000 euro (Džankić, 2015, p. 10). IIP di Malta segera menjadi perdebatan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun di lingkup Uni Eropa. Kemudian pada November 2013, Malta melakukan revisi terhadap IIP dengan menambahkan kriteria yang harus dipenuhi investor untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan. Kriteria tambahan tersebut adalah kepemilikan properti senilai 350.000 euro, menyewa properti dengan nilai 16.000 euro per tahun atau investasi sebesar 150.000 euro pada proyek-proyek yang ditentukan pemerintah (Džankić, 2015, p. 10). Akan tetapi, IIP tetap menjadi perdebatan sampai ke tingkat Parlemen Uni Eropa pada pertengahan Januari 2014 (Džankić, 2015, p. 10). Pada perdebatan ini, parlemen memutuskan untuk mengadakan pengambilan suara terkait perlunya *joint motion for resolution*. Hasil pengambilan suara berakhir dengan 560 suara setuju, 22 suara menolak dan 44 abstain (European Parliament, 2014). Resolusi Parlemen Uni Eropa pada debat '*Citizenship for sale*' menyatakan bahwa skema pemberian kewarganegaraan melalui *Citizenship by Investment Program* dapat merusak konsep kewarganegaraan Uni Eropa dan merusak *mutual trust* yang menjadi dasar pembentukan Uni Eropa (European Parliament, 2014).

Menyorot pada pernyataan Parlemen Uni Eropa tersebut, penulis meyakini hal tersebut sebagai identifikasi pertama yang dilakukan Parlemen Uni Eropa terhadap isu *Citizenship by Investment Program*. Selanjutnya Parlemen Uni Eropa juga meminta Komisi Uni Eropa untuk menyatakan dengan jelas apakah skema *Citizenship by Investment* ini telah sesuai dengan isi dan semangat *European Union's Treaties, the Schengen Borders Code* serta aturan Uni Eropa terkait non-diskriminasi (European Parliament, 2014). Pada Maret 2014, Komisi Uni Eropa

mengeluarkan tanggapan terkait *Citizenship by Investment Program* sekaligus menjawab permintaan Parlemen Uni Eropa kala debat '*Citizenship for sale*' pada Januari 2014. Tanggapan tersebut berisi bahwa dalam menjalankan hak prerogatifnya untuk memberikan kewarganegaraan, setiap negara anggota Uni Eropa harus menjalankannya dengan semangat kerja sama yang tulus dengan negara anggota lain maupun Uni Eropa itu sendiri (Mentzelopoulou & Dumbrava, 2018). Komisi Uni Eropa juga menyatakan bahwa akan melakukan analisis terhadap skema *Citizenship by Investment Program* untuk menentukan langkah apa yang mungkin diperlukan (European Commission, 2014).

Tanggapan dari Komisi Uni Eropa atas permintaan Parlemen Uni Eropa terkait isu *Citizenship by Investment Program* menunjukkan bahwa adanya konsensus antara aktor yaitu Komisi dan Parlemen Uni Eropa. Pernyataan Komisi Uni Eropa yang akan melakukan analisis terhadap *Citizenship by Investment Program* merupakan upaya identifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, jika melihat pada pengertian unsur *issue area* terkait adanya identifikasi dan konsensus menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Unsur kedua dalam kerangka kerja model modifikasi milik Amitav Acharya adalah *securitizing actors*, yaitu aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dan kepentingan siapakah yang mereka wakili. Mengacu pada definisi ini, maka *securitizing actor* dalam sekuritisasi ini adalah Parlemen Uni Eropa. Komisi Uni Eropa dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *functional actors*, yaitu aktor yang dapat mempengaruhi dinamika tanpa harus menjadi *referent objects* ataupun *securitizing actor* (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, p. 36).

Baik Parlemen dan Komisi Uni Eropa menegaskan bahwa sekuritisasi terhadap *Citizenship by Investment Program* dilakukan atas dasar CIP dapat merusak konsep kewarganegaraan dan *mutual trust* di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Melalui pernyataan ini dapat dilihat bahwa konsep keamanan yang digunakan adalah jenis *societal security*. *Societal security* sendiri didefinisikan sebagai suatu tentang kelompok-kelompok identitas yang besar dan mandiri secara empiris bervariasi pada waktu dan tempat (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, p. 119). *Societal security* berbicara tentang *society* (masyarakat) yang menjadi fokus utama dari masalah keamanan baru ini, maka masalah identitas dan migrasilah yang mendorong persepsi mendasar tentang ancaman dan kerentanan (McSweeney, 2007, p. 123).

Mengacu pada unsur kedua terkait *securitizing actors*, kita dapat memahami bahwa isu ini dibawa ke perdebatan oleh anggota-anggota parlemen yang berasal dari kelompok politik yang didominasi Jerman, Perancis dan Italia. Sebagai negara-negara pelopor berdirinya Uni Eropa, tentu ketiga negara ini berusaha mempertahankan esensi dasar pembentukan Uni Eropa. Oleh karena itu, masuknya orang-orang asing sebagai warga Uni Eropa melalui *Citizenship by Investment Program* merupakan ancaman bagi nilai-nilai yang sudah terbangun sejak pembentukan Uni Eropa. Nilai-nilai inilah kemudian yang membentuk Uni Eropa sebagai sebuah identitas. Negara-negara ini tentu juga menyadari bahwa untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah. Melalui *Citizenship by Investment Program*, kewarganegaraan Uni Eropa menjadi sesuatu yang bisa dijangkau oleh orang-orang di luar Uni Eropa dan hal ini jelas bertentangan dengan pandangan negara

anggota Uni Eropa terutama mereka yang menjadi pelopor berdirinya Uni Eropa. Parlemen sendiri juga menegaskan dalam resolusi pada debat *'Citizenship for sale'* tahun 2014, *"Every Member State was expected to act responsibly in preserving the Union's common values and achievements, and those values and achievements were invaluable and could not have a price tag attached to them"* (European Parliament, 2014).

Pada proses sekuritisasi, *speech act* merupakan suatu hal yang penting. Sejauh ini *speech act* yang dilakukan baik Parlemen dan Komisi Uni Eropa adalah memberikan kecaman pada perdebatan maupun melalui *report*. Memang, sejak membawa isu CIP ke dalam perdebatan Parlemen Uni Eropa pada Januari 2014 silam, isu CIP mulai menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini terlihat melalui *report* yang dikeluarkan baik oleh Komisi Uni Eropa maupun organisasi non pemerintah seperti *Transparency International* dan *Global Witness* hingga penelitian maupun berita yang dikeluarkan media seperti *The New York Times* dan *Politico*. Walaupun begitu, dalam isu CIP ini, *speech act* sendiri dapat dikatakan belum cukup berhasil dikarenakan proses sekuritisasi yang masih berjalan hingga sekarang. Komisi Uni Eropa sendiri seperti yang dijelaskan pada poin A terkait *issue area* baru melakukan identifikasi untuk melihat sejauh apa ancaman yang dapat ditimbulkan *Citizenship by Investment Program* di negara-negara anggotanya dan saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan. Untuk itulah perlu bagi Uni Eropa terutama Parlemen Uni Eropa untuk melakukan *speech act* yang lebih vokal dan kontinyu dalam isu CIP ini.

Outcome dari upaya sekuritisasi Uni Eropa sejauh ini yang paling utama adalah dikeluarkannya *report* oleh Komisi Uni Eropa. *Report* yang dikeluarkan pada 23 Januari 2019 ini menjadi kunci penting bagi upaya sekuritisasi terhadap isu *Citizenship by Investment Program*. *Report* ini menunjukkan *concern* Komisi Uni Eropa sebagai badan eksekutif sekaligus menegaskan arah sekuritisasi yang dimulai oleh Parlemen Uni Eropa. Melalui pembentukan kelompok ahli untuk lebih lanjut menangani masalah transparansi, tata kelola dan keamanan (European Commission, 2019) diharapkan upaya sekuritisasi terhadap CIP tidak berhenti sampai di sini saja. Komitmen untuk mendalami isu CIP juga diharapkan akan terus dilakukan oleh Uni Eropa. Pada dasarnya hasil sekuritisasi yang dilakukan memang belum terlihat signifikan karena proses sekuritisasi sendiri masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun begitu, kepedulian dan kemauan Komisi Uni Eropa dapat menjadi titik penting dalam keberlanjutan sekuritisasi ini.

Selain kelima unsur dalam kerangka kerja sekuritisasi model Amitav Acharya yaitu *issue area*, *securitizing actor*, *security concept*, *process* dan *outcome*, terdapat satu unsur lain yaitu *conditions affecting securitization*. Kondisi pertama yang dapat mempengaruhi sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program* adalah pemberian kewarganegaraan merupakan hak prerogatif dari sebuah negara. Hal ini diakui oleh Uni Eropa sendiri di mana juga disebutkan dalam *report* yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa terkait *Citizenship by Investment Program* sebagai berikut:

"The Court of Justice of the EU has held, in what is now settled case-law, that, while it is for each Member State to lay down the conditions for the acquisition and loss of nationality, they must do so having due regard to Union law. Having due regard to EU law means taking into account all rules forming part of the Union legal order and includes having due

regard to norms and customs under international law as such norms and customs form part of EU law” (European Commission, 2019).

Kondisi kedua yang dapat mempengaruhi sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program* adalah *desecuritizing actors* yaitu aktor yang memandang suatu isu bukan sebagai ancaman. IMC sebagai asosiasi *Investment Immigration* dan *Citizenship by Investment Program* menyatakan ketidaksetujuan atas beberapa poin dari *report* yang dikeluarkan baik dari Parlemen Uni Eropa maupun Komisi Uni Eropa. Terkait *report* dari Parlemen Uni Eropa, Bruno L’ecuyer selaku *Chief Executive* IMC menyatakan bahwa *report* tersebut “...reaches the right conclusions for the wrong reasons” (Investment Migration Council, 2018). IMC setuju bahwa perlu adanya kepastian integritas serta perlunya standarisasi pendekatan berbasis risiko yang sistematis untuk *due-diligence*, akan tetapi IMC menegaskan bahwa menyatakan industri ini sebagai ancaman bagi keamanan dan keadilan serta mengikis kepercayaan antar negara Uni Eropa adalah suatu kesalahan dan merupakan sebuah bias media yang memiliki motivasi politis (Investment Migration Council, 2018).

IMC juga menyatakan keberatannya atas *report* yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa pada 23 Januari 2019. IMC meminta adanya keseimbangan yang lebih baik dalam laporan ini karena dianggap tidak menyajikan atau mencerminkan manfaat sosial ekonomi yang mendasar dari *Citizenship by Investment Program* sehingga tidak konstruktif untuk pembentukan kebijakan maupun debat (Investment Migration Council, 2019). Lebih lanjut, IMC mengatakan bahwa program ini menciptakan keuntungan sosial tidak hanya melalui peningkatan pendapatan pemerintah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan belanja infrastruktur tetapi juga melalui kesempatan baru di semua tingkatan masyarakat (Investment Migration Council, 2019). Senada dengan IMC, Henley & Partners sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri ini juga menyatakan bahwa *report* yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa ‘*fundamentally misguided*’ dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap industri *investment migration* (Henley & Partners, 2019). Menurut Henley & Partners, *report* ini mengabaikan keuntungan sosial dan ekonomi dari *investment migration* (Henley & Partners, 2019).

Pemerintah Malta menyatakan ketidaksetujuan pada poin yang menyatakan bahwa naturalisasi melalui *Citizenship by Investment Program* dilakukan dengan proses yang tidak lebih ketat dibandingkan naturalisasi biasa (Individual Investor Programme, 2019). Pemerintah Malta menegaskan bahwa sebagai anggota Uni Eropa, Malta menjunjung tinggi aturan hukum Uni Eropa dan selalu bertindak dengan semangat itikad baik sesuai aturan yang berlaku (Individual Investor Programme, 2019). Pemerintah Malta menambahkan bahwa selama empat tahun pertama, *Individual Investor Programme* Malta telah menghasilkan pendapatan lebih dari € 700 juta, 70% di antaranya akan diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek infrastruktur dan sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (Individual Investor Programme, 2019). Pada saat volatilitas geopolitik tinggi, Malta yakin bahwa program ini dapat menawarkan rumah kedua yang aman dan stabil sekaligus kesempatan untuk bekerja, belajar dan melakukan bisnis lebih baik (Individual Investor Programme, 2019). Pemerintah Malta yakin bahwa program ini memiliki dampak positif sehingga berharap dapat terus bekerja sangat erat dengan Komisi Uni

Eropa dengan pikiran terbuka dan dengan semangat kerja sama yang tulus untuk lebih meningkatkan standar dalam industri ini (Individual Investor Programme, 2019). Mata pencaharian banyak orang bergantung pada industri ini, oleh karena itu Malta akan terus berinvestasi dalam semua faktor mitigasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutannya (Individual Investor Programme, 2019).

KESIMPULAN

Citizenship by Investment Program sendiri merupakan suatu hal yang umum dan banyak dijalankan negara-negara di dunia. Namun, pada situasi ini, Uni Eropa memilih untuk melakukan sekuritisasi atas dasar bahwa sebagai sebuah organisasi yang terintegrasi, kebijakan yang diambil suatu negara dapat berdampak pada negara anggota lainnya. Hal yang dimaksud adalah aturan terkait kewarganegaraan di Uni Eropa di mana setiap warga negara dari negara anggota Uni Eropa merupakan warga negara Uni Eropa sehingga risiko kejahatan yang timbul dari *Citizenship by Investment Program* yaitu masuknya pelaku kejahatan finansial seperti pencucian uang, korupsi dan penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada negara yang menjalankan program tersebut tetapi juga ke negara lain dan Uni Eropa secara keseluruhan. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka kerja model modifikasi Amitav Acharya yang terdiri dari enam unsur yaitu *issue area*, *securitizing actors*, *security concept*, *process*, *outcome* dan *conditions affecting securitizations*, sejauh ini proses sekuritisasi telah berlangsung cukup baik. Akan tetapi, memang terdapat kendala dalam proses sekuritisasi yang dilakukan. Kendala tersebut yaitu hak prerogatif negara terkait pemberian dan penghilangan kewarganegaraan serta aktor-aktor yang melakukan desekuritisasi.

REFERENSI

- 2ndPassport. (n.d). *What's The Difference Between CBI, Residency And Permanent Residency?* Tersedia di:
<https://2ndpassports.com/2ndpassports-com-whats-the-difference-between-cbi-residency-and-permanent-residency/> [Diakses pada 7 November 2018].
- Arton Capital. (n.d). *Citizenship by Investment*. Tersedia di:
<https://www.artoncapital.com/citizenship-by-investment/#history> [Diakses pada 5 November 2018].
- BBC. (2017). *Why Citizenship is Now A Commodity*. Tersedia di:
<http://www.bbc.com/capital/story/20170530-why-citizenship-is-now-a-commodity> [Diakses pada 5 November 2018].
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Callabero-Anthony, M., & Emmers, R. (2016). Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security. Dalam M. Callabero-Anthony, R. Emmers, & A. Acharya, *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization* (hal. 1-12). New York: Routledge.
- Džankić, J. (2015). *Investment-based Citizenship and Residence Programmes in the EU*.
- European Commission. (2014). *Follow-up to the European Parliament resolution on EU citizenship for sale*.

- European Commission. (2019). *Report from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union*. Brussels: European Commission.
- European Parliament. (2014). *Legislative Observatory*. Tersedia di: <https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1332945&t=e&l=en> [Diakses pada 5 Maret 2019].
- European Union. (n.d). *Bulgaria*. Tersedia di: European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_en [Diakses pada 10 November 2018].
- European Union. (n.d). *Cyprus*. Tersedia di: European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_en [Diakses pada 10 November 2018].
- European Union. (n.d). *Malta*. Tersedia di: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_en [Diakses pada 10 November 2018].
- Henley & Partners. (2019). *Henley & Partners Calls for Dialogue and Co-operation in Response to the European Commission Report on Investment Migration Programs in the EU*. Tersedia di: https://www.imidaily.com/wp-content/uploads/2019/01/HP-Statement_EC-Report-on-IM-in-EU_Final-Approved_190122.pdf [Diakses pada 9 Mei 2019].
- Individual Investor Programme. (2019). *Reaction to the Report from the Commission regarding Investor Citizenship and Residence Schemes in the EU*. Tersedia di: <https://iip.gov.mt/2019/01/23/reaction-to-the-report-from-the-commission-regarding-investor-citizenship-and-residence-schemes-in-the-eu/> [Diakses pada 20 April 2019].
- Investment Migration Council. (2018). *Investment Migration Council Responds to European Parliamentary Research Service*. Tersedia di: <https://investmentmigration.org/wp-content/uploads/IMC-Response-on-EP-Report.pdf> [Diakses pada 5 Mei 2019].
- Investment Migration Council. (2019). *Investment Migration Council Press Statement European Commission Report on Investor Citizenship*. Tersedia di: https://investmentmigration.org/wp-content/uploads/European-Commission-Report-on-Investor-Citizenship-2019_with-statement.pdf [Diakses pada 5 Mei 2019].
- McSweeney, B. (2007). Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School. Dalam B. Buzan, & L. Hansen, *International Security Volume III* (hal. 121-134). London: SAGE Publications.
- Mentzelopoulou, M. M., & Dumbrava, C. (2018). *Acquisition and loss of citizenship in EU Member States: Key trends and issues*. European Parliamentary Research Service .
- Nahar, M., & Rahman, M. (2017). Is Citizenship by Investment Program a Reason Behind Money Laundering? An Empirical Study. *Australian Journal of Accounting, Economics and Finance*, Vol. 3, Issue 2, 58-67.
- Nomad Capitalist. (2018). *What is Citizenship by Investment? How to Buy Citizenship Fast*. Tersedia di:

<https://nomadcapitalist.com/2018/06/23/what-is-citizenship-by-investment/> [Diakses pada 5 November 2018].

OCCRP. (n.d). *Gold for Visas*. Tersedia di:

<https://www.occrp.org/en/goldforvisas/> [Diakses pada 11 Mei 2018].

Transparency International. (2018). *Passport Dealers of Europe: Navigating the Golden Visa Market*. Tersedia di:

https://www.transparency.org/news/feature/navigating_european_golden_visas [Diakses pada 11 Mei 2018].

Transparency International & Global Witness. (2018). *European Getaway: Inside The Murky World of Golden Visas*. Transparency International dan Global Witness.